

**AKUNTABILITAS PUBLIK BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) DI SMP NEGERI 6 SIBOLGA**

TESIS

OLEH

**DESNAWATI PANJAITAN
NPM. 101801018**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

**AKUNTABILITAS PUBLIK BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) DI SMP NEGERI 6 SIBOLGA**

TESIS

OLEH

**DESNAWATI PANJAITAN
NPM. 101801018**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

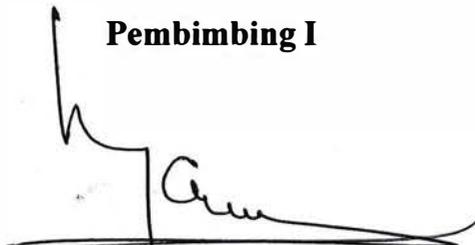
**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 6 Sibolga
Nama : Desnawati Panjaitan
NPM : 101801018

Menyetujui

Pembimbing I



Drs. Usman Tarigan, MS.

Pembimbing II



Drs. Kariono, MA.

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Dr. Warjio, MA.



Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS.

Telah diuji pada Tanggal 28 April 2012

Nama : Desnawati Panjaitan

NPM : 101801018

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Drs. Heri Kusmanto, MA.

Sekretaris : Isnaini, SH, M.Hum.

Pembimbing I : Drs. Usman Tarigan, MS.

Pembimbing II : Drs. Kariono, MA.

Penguji Tamu : Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA.

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desnawati Panjaitan
NPM : 101801018

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini dengan judul :

“Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 6 Sibolga”

Adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain.

Apabila di kemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinal dan merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia di cabut gelar magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, Agustus 2012

Yang menyatakan,



Desnawati Panjaitan

ABSTRAK

Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMP Negeri 6 Sibolga

Nama : Desnawati Panjaitan ; NIM : 101801018

Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membesarkan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang laun, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan baik menyangkut aspek kelembagaan maupun teknis operasional. Salah satu sekolah yang mendapat perhatian dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah SMP Negeri 6 Sibolga . Pada tahun 2010 SMP Negeri 6 Sibolga mendapat bantuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 128.800.000,- yang telah digunakan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMP Negeri 6 Sibolga Tahun 2010.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas publik dalam pengelolaan dan operasional sekolah (BOS) pada SMP Negeri 6 Sibolga. Sampel diambil sebanyak 42 orang secara purposive sampling yang mewakili para stakeholders terdiri Kepala Sekolah, Guru-guru, Komite Sekolah dan Aparat Pemerintah (Dinas Pendidikan Kota Sibolga). Analisis data dilakukan dengan tabel frekuensi secara deskriptif,

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 6 Sibolga dilihat dari aspek Adanya proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis, Adanya Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan pengelolaan dana BOS , Adanya Kejelasan dari sasaran kebijakan, dan Adanya kelayakan dan konsistensi dalam pelaporan keuangan secara umum telah berjalan dengan baik. Aspek akuntabilitas dalam Pengelolaan BOS di SMP Negeri 6 Sibolga yang belum efektif dalam pelaksanaannya adalah penyebaran informasi mengenai pengelolaan dana BOS , akses publik pada informasi atas kegiatan pengelolaan dana BOS , sistem informasi manajemen dan monitoring hasil dan Laporan pertanggung jawaban (*annual report*). Untuk pengelolaan dana BOS berdasarkan persepsi pengguna di di SMP Negeri 6 Sibolga sudah memenuhi standar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) karena dalam pengelolaannya berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dalam penyalurannya sudah tepat sasaran; Opini atas hasil akuntabilitas dapat disimpulkan, dalam pengelolaan dana BOS berdasarkan persepsi pengguna di SDN di SMP Negeri 6 Sibolga sudah memenuhi standar akuntansi auditor karena dalam pengelolaan dana BOS dapat dikatakan hasil auditnya sudah mencakup Wajar Tanpa Pengecualian, dan dalam standar auditing juga sudah mencakup tentang standar umum, standar pekerja lapangan, dan standar pelaporan; Kendala-kendala dalam proses pengelolaan dana BOS berdasarkan persepsi pengguna dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa kendala kepala sekolah dan bendahara tentang informasi Tim Manajemen Kota Sibolga belum dipahami oleh sekolah, masih terdapat masalah dalam pengalokasian, dengan adanya kendala ini kepala sekolah dan bendahara harus lebih memahami tentang informasi Tim Manajemen guna untuk kelancaran pengelolaan dana BOS .

Key words : *Akuntabilitas publik, Bantuan Operasional Sekolah (BOS).*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Adapun judul Tesis ini adalah “Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMP Negeri 6 Sibolga”. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih dirasakan sekali banyak kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan penulis. Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi, dan partisipasi berbagai pihak, baik secara moril dan materil yang diberikan kepada penulis. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan syukur dan terima kasih yang banyak kepada :

1. Bapak Prof.Dr. A. H. M. Ya`kub Matondang MA, Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof.Dr.Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Warjio, MA, Ketua Program Studi MAP, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Bapak Drs. Kariono, MA, sebagai Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Drs. Heri Kusmato, MA, sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.

6. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.
7. Terimakasih pula semua pihak yang telah memberikan bantuan serta seluruh keluarga yang senantiasa memberi dorongan dan semangat serta do`a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Terimakasih pula kepada Istri Tercinta, anak dan keluarga, yang senantiasa memberi dorongan dengan semangat serta do`a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Semoga amal sholeh mereka semua mendapat balasan yang berlimpat ganda dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Medan, April 2012

P e n u l i s

Desnawati Panjaitan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Hasil Penelitian	6

BAB II : Tinjauan Pustaka

2.1. Akuntabilitas Publik	7
2.1.1. Konsep akuntabilitas	7
2.1.2. Akuntabilitas Publik	8
2.1.3. Implementasi Akuntabilitas Publik	13
2.2. Program Bantuan Operasional Sekolah.....	17
2.2.1. Pengertian BOS	17
2.2.2. Mekanisme Pelaksanaan	20
2.2.3. Organisasi Pelaksana	29

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian.....	36
3.2. Lokasi Penelitian	36
3.3. Variabel Penelitian	36
3.4. Populasi Sasaran.....	37
3.5. Sampel Penelitian.	37
3.6. Teknik Pengumpulan Data.	38
3.7. Analisis Data.	39

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1. Gambaran Kota Sibolga	40
4.1.1 Sejarah Kota Sibolga	40
4.1.2 Letak dan Geografis	49
4.2. Gambaran Singkat SMP Negeri 6 Sibolga	57
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Hasil Penelitian.....	58
5.1.1 Karakteristik Responden.....	58
5.1.2 Variabel Penelitian.....	61
5.2. Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas	84
5.3. Peran Masyarakat dalam Akuntabilitas Pendidikan	87
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Metode Penelitian.....	89
6.2. Lokasi Penelitian	90
DAFTAR PUSTAKA	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian.

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan Pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antarbangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa untuk bisa memenangi kompetisi global.

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar.

Kenaikan harga BBM beberapa tahun terakhir ini yang diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya, akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin. Hal tersebut lebih lanjut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (AKP). Pada tahun 2008, AKP tingkat SMP sebesar 85,22% dan pada akhir 2010 telah mencapai 88,68%. Target penuntasan Wajar 9 tahun harus dicapai pada tahun 2008/2009 dengan APK minimum 95%. Dengan demikian, pada saat ini masih ada sekitar 1,5 juta anak usia 13-15 tahun yang masih belum mendapatkan layanan pendidikan dasar. Selain masalah pencapaian target AKP, permasalahan lain yang dihadapi adalah masih rendahnya mutu pendidikan yang antara lain mencakup masalah tenaga kependidikan, fasilitas, manajemen, proses pembelajaran dan prestasi siswa.

Dengan adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak, amanat undang-undang dan upaya tahun yang bermutu, Pemerintah melanjutkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri/Swasta

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim. 2006. *Reformasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Ablo, Emmanuel & Ritva Reinikka. 1998. *Do budget really matter? Evidence from public spending on education and health care in Uganda*. World Bank, *Policy Research Paper 1926*
- Allen, Richard & Daniel Tommasi. 2001. *Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries*. Paris: SIGMA-OECD
- Budiardjo, Miriam, 1998, *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*, Bandung, Mizan.
- Boynton and Kell. 1996. *Internal control system*. Prentice-Hall International. New Jersey
- Dwiyanto, Agus, et al, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, Yogyakarta.
- Keefer, Philip & Stuti Khemani. 2003. The political economy of public expenditures. *Background paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People*. The World Bank.
- Kumorotomo, Wahyudi & Erwan Agus Purwanto (eds.), *Anggaran Berbasis Kinerja: Konsep dan Aplikasinya*, MAP Press, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 2005
- Kumorotomo, Wahyudi, 2008, Teknik Penganggaran Untuk Perencanaan Sosial, Materi ini disampaikan pada Pelatihan Perencanaan Pembangunan Sosial-Budaya Provinsi Maluku Utara. Ternate, 14-21 Januari 2008.
- Keban, Yeremias T., 2009, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta, Gava Media.
- Lalono Krina P., Loina, 2003, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, Jakarta, Sekretariat Good Public Governance Bappenas.
- Mardiasmo (2002), *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi Yogyakarta.

- Mardiasmo, 2006, Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*, *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, Mei 2006, Hal 1 – 17
- Milles, B. Mathew dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis data kualitatif*, Alih bahasa Tjeep Rohaendi Rohidi, Jakarta, UI Press,.
- Moleong, Lexy J. 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Pranoto, 1999, *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Bahan Diklat SPAMA, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia,.
- Suprijadi, Anwar, 2009, *Etika Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance*, Jakarta, Jurnal Program Magister STIA-LAN,
- Sutopo, Heribertus, 1988, *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*, Surakarta, Pusat Penelitian UNS.
- Wahab, Solichin Abdul., 1990, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Winarno, Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Presindo.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*